



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR ...../POJK.04/2014  
TENTANG  
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan dari Pasar Modal bagi Emiten atau Perusahaan Publik sehingga dapat membuat Pasar Modal sebagai pilihan alternatif sumber pembiayaan yang lebih kompetitif bagi dunia usaha dan untuk memberikan kemudahan kepada Emiten dalam menerbitkan surat hutang dan/atau sukuk, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 555/BL/2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penawaran Umum Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Moda (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan adalah kegiatan Penawaran Umum atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan secara bertahap.
2. Gagal Bayar adalah tidak terpenuhinya kewajiban finansial Emiten atau Perusahaan Publik terhadap kreditur pada saat jatuh tempo.

##### Pasal 2

Penawaran Umum Berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

### BAB II

#### PERSYARATAN PIHAK

##### Pasal 3

Pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun; atau
- (2) tidak lagi menjadi Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), namun:
  - a. pernah melakukan Penawaran Umum atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; dan
  - b. telah melunasi Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak lebih dari 2 (dua) tahun sebelum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

##### Pasal 4

Dalam hal Penawaran Umum Berkelanjutan dilakukan oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), maka selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, Pihak dimaksud tidak pernah mengalami kondisi Gagal Bayar.

##### Pasal 5

Dalam hal Penawaran Umum Berkelanjutan dilakukan oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), maka selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, Pihak dimaksud tidak pernah mengalami kondisi Gagal Bayar sampai dengan tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

### BAB III PERSYARATAN EFEK

#### Pasal 6

Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

#### Pasal 7

Emiten dilarang melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan apabila seluruh Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

#### Pasal 8

Emiten yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, hanya dapat melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya pada periode Penawaran Umum Berkelanjutan apabila Efek bersifat utang dan/atau Sukuk telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan periode Penawaran Umum Berkelanjutan belum berakhir.

### BAB IV PERNYATAAN PENDAFTARAN

#### Pasal 9

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan wajib:

- (1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1, IX.A.2, IX.C.1, IX.C.2 dan peraturan yang terkait lainnya, kecuali dinyatakan lain dalam Peraturan ini; dan
- (2) dilengkapi dengan surat pernyataan dari Emiten atau Perusahaan Publik dan pernyataan dari Akuntan yang menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5.

#### Pasal 10

Halaman luar kulit muka Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ditambahkan informasi:

- (1) judul Propektus yang bertuliskan "Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan"; dan
- (2) total jumlah dana yang akan dihimpun dan jenis Efek yang akan diterbitkan selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan.

## BAB V

### KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN INFORMASI

#### Pasal 11

Penjamin Emisi Efek atau Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir Nomor: IX.A.2-2 lampiran 2, Formulir Nomor: IX.A.2-3 lampiran 3, Formulir Nomor: IX.A.2-4 lampiran 4, Formulir Nomor: IX.A.2-5 lampiran 5, Formulir Nomor: IX.A.2-6 lampiran 6, Formulir Nomor: IX.A.2-7 lampiran 7, dan Formulir Nomor: IX.A.2-8 lampiran 8 Peraturan Nomor IX.A.2. Laporan dimaksud disertai dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7.

#### Pasal 12

Dalam hal dana yang dihimpun selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan kurang dari yang direncanakan, Emiten wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai jumlah total dana yang dihimpun beserta alasan mengenai tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah periode PUB berakhir.

#### Pasal 13

Dalam hal Emiten akan menghentikan Penawaran Umum Berkelanjutan sebelum periode 2 (dua) tahun maka Emiten wajib menyampaikan pemberitahuan penghentian Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan penghentian dan jumlah total dana yang telah dihimpun.

#### Pasal 14

Mengumumkan kepada masyarakat mengenai penghentian Penawaran Umum Berkelanjutan disertai dengan alasan penghentian dan jumlah total dana yang telah dihimpun dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional bersamaan dengan penyampaian pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 13.

#### Pasal 15

Sebelum melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap kedua dan seterusnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan, Emiten terlebih dahulu wajib menyampaikan informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan informasi tambahan dimaksud dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan.

#### Pasal 16

Informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 15, paling sedikit memuat :

- a. jumlah dana yang telah dihimpun dalam Penawaran Umum Berkelanjutan;
- b. jumlah Efek yang ditawarkan;

c. tingkat ...

- c. tingkat bunga Efek bersifat utang/imbal hasil Sukuk;
- d. hasil pemeringkatan atas Efek atau perubahan hasil pemeringkatan atas Efek (jika terdapat perubahan hasil pemeringkatan atas Efek);
- e. jadwal Penawaran Umum Berkelanjutan;
- f. rencana penggunaan dana atau perubahan penggunaan dana;
- g. ikhtisar data keuangan penting untuk laporan keuangan terkini yang dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya;
- h. Penjamin Emisi Efek (jika ada);
- i. pernyataan Emiten bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material telah diungkapkan dan Informasi atau Fakta Material tersebut tidak menyesatkan;
- j. pernyataan dalam huruf cetak tebal bahwa "PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK TAHAP KE-.... DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF";
- k. pernyataan dari Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik tidak sedang mengalami kondisi Gagal Bayar pada saat penyampaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15; dan
- l. perubahan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan (jika ada).

#### Pasal 17

Penyampaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

### BAB VI

#### PENUNDAAN PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

#### Pasal 18

Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- (1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:
  - a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
  - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau

- c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan

(2) Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Emiten yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Emiten wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

#### Pasal 19

Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut :

- (1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf a, maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf a, maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- (3) wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 12, pasal 14 dan pasal 15 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pasal 21

Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) huruf a dan pasal 19 ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pasal 22

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dapat disebut Peraturan No. IX.A.15 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal .....  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal.....  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .....NOMOR .....

RANCANGAN PENJELASAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR ..... /POJK.04/.....  
TENTANG  
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

UMUM

Setiap Penawaran Umum wajib mengikuti ketentuan Penawaran Umum yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan Peraturan IX.A.2 tentang Tata Cara Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Melalui ketentuan tersebut Emiten baru dapat melakukan Penawaran Umum setelah diperolehnya pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Seiring dengan semakin berkembangnya Pasar Modal, jumlah Emiten maupun nilai efek yang ditawarkan meningkat dengan pesat khususnya Penawaran Umum Obligasi/Sukuk. Bahkan beberapa Emiten menerbitkan Obligasi/Sukuk lebih dari satu kali dalam setahun.

Melihat perkembangan pasar yang pesat tersebut, pada tanggal 30 Desember 2010, Bapepam dan LK menerbitkan Peraturan Nomor IX.A.15 melalui keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-555/BL/2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada Emiten yang memenuhi persyaratan untuk melakukan Penawaran Umum secara berkelanjutan atas Efek bersifat utang yang memenuhi persyaratan dalam periode dua tahun dengan melakukan Pernyataan Pendaftaran hanya sekali.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan sehingga tidak terdapat perbedaan dalam menginterpretasikan peraturan ini.

Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan No IX.A.15 yang bertujuan untuk mengatur hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh Emiten apabila akan melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut.

Pasal demi pasal

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam hal kewajiban tersebut telah direstrukturisasi sebelum jatuh tempo maka Emiten tersebut tidak dianggap gagal bayar.

Dalam hal restrukturisasi dilakukan setelah kewajiban jatuh tempo maka Emiten tersebut dianggap gagal bayar.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3...



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik adalah peringkat yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek tanpa memperhitungkan simbol + (plus) dan - (minus).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (2)

Pernyataan Akuntan dapat dinyatakan dalam comfort letter atau bentuk lainnya.

Yang dimaksud dengan Akuntan adalah Akuntan yang mengaudit laporan keuangan Emiten periode terakhir.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Dalam hal terdapat tanggapan tertulis dari OJK atas informasi tambahan, Penawaran Umum Emiten baru dapat dilakukan setelah Emiten memenuhi tanggapan OJK dan mengumumkan perubahan informasi tersebut.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .....